



Analisis Dampak Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Terhadap Nilai dan Kinerja pada Perusahaan DPD REI Sumatera Utara

* **Rahman Ali Nasution**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Muhammad Akbar Al-Ghifari Barus

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Muhammad Arif

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia

*Korespondensi penulis: rahmanalinst@gmail.com

Abstract : *Currently, the SLF is a requirement for evaluating the administrative and technical suitability of the building. The growth of industries has led to the government requiring the publication of SLF in order to legalize a business or structure, particularly those engaged in the sale of buildings or the provision of building amenities. In the company DPD REI SUMATERA NORTH, SLF (Certificate of Laik Function) is a phenomenon that this study aims to explore and explain. The author also emphasizes the effect of the worth and effectiveness of SLF's publication on the research locus. This study employed a case study approach to qualitative research as its methodology. Researchers seek for literature pertinent to research concerns as part of their data gathering procedures. from books, theses, journals, research essays, and research reports. The researchers in this study used Scopus, Google Scholar, and other sources to cite earlier journals. According to the study's findings, the issuing of the SLF (Laik Function Certificate) had a favorable effect on the worth and productivity of the business DPD REI SUMATERA NORTH. This offers convenience and a fulfilling employment so it can draw in investors and the general public to enhance marketing. The SLF's release is an urgent matter for a firm to address in order to raise quality and have a favorable effect on the economy and revenue.*

Keywords : *SLF; Impact; Value; Performance; Company*

Abstrak : Pada saat ini SLF (Sertifikat Laik Fungsi) merupakan sebuah syarat untuk menguji kelayakan bangunan secara administratif dan teknis. Berkembangnya industri-industri, membuat pemerintahan mewajibkan adanya penerbitan SLF untuk melegalkan sebuah perusahaan maupun gedung, terutama perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran bangunan dan penyediaan fasilitas bangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menelaah fenomena SLF (Sertifikat Laik Fungsi) di perusahaan DPD REI SUMATERA UTARA. Selain itu, penulis memfokuskan dampak nilai dan kinerja akibat penerbitan SLF di lokus penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kepsuatakaan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mencari literatur yang relevan dengan masalah penelitian dari buku, tesis, laporan penelitian, jurnal, dan karangan-karangan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mengutip jurnal-jurnal terdahulu dari scopus, google scholar, dan lainnya. Hasil dari penelitian ini ditemukan adanya dampak positif penerbitan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) terhadap nilai dan kinerja di perusahaan DPD REI SUMATERA UTARA. Di mana memberikan rasa nyaman serta kepuasan kerja sehingga dapat menarik investor dan masyarakat dalam meningkatkan pemasaran. Kesimpulannya adalah penerbitan SLF menjadi hal urgensi bagi sebuah perusahaan untuk meningkatkan kualitas sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dan pendapatan.

Kata kunci : SLF; Dampak; Nilai; Kinerja; Perusahaan

LATAR BELAKANG

Seiring berjalannya waktu, Indonesia telah menjadi negara dengan tingkat perkembangan yang tinggi. Selain itu, pertumbuhan dan peningkatan populasi meningkatkan pembangunan. Semakin banyak orang, semakin banyak kesempatan kerja, sehingga perusahaan industri menggunakannya untuk membuat bangunan. Hal ini tentu saja membuat pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk mengatur perusahaan agar dapat berjalan dengan baik dengan memenuhi persyaratan administrasi izin mendirikan bangunan. Dalam hal hak pakai dan izin pembangunan, pemerintah mengeluarkan izin yang disebut Sertifikat Layak Fungsional atau yang dikenal dengan SLF (lia dwi jayantiMPOC & Brier, 2020).

Perubahan menuju arah progresif yang didasarkan pada keadilan dan manfaat kesejahteraan fisik dan mental orang dikenal sebagai pembangunan. Mengurangi pembangunan dan mengentaskan kemiskinan adalah tujuan pembangunan ekonomi (Fatma Cholida et al., 2020).

Bangunan gedung merupakan tempat penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat atau perorangan yang memiliki nilai ekonomi dan sosial, sehingga bangunan gedung harus dibangun dalam kondisi handal yang artinya dapat memberikan perlindungan, kesehatan, kemudahan, dan kenyamanan bagi penghuninya, sehingga terdapat peraturan yang mengatur keandalan suatu konstruksi bangunan gedung (Harisun, 2013). Kegagalan konstruksi dan kegagalan konstruksi mengakibatkan kegagalan struktur sehingga tidak berfungsi dengan baik. Kegagalan dalam proyek konstruksi dapat disebabkan oleh komponen teknis dan non-teknis. (2019, tt)

Menurut definisinya, Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah hak atau aspek properti yang disahkan di Indonesia untuk mematuhi Undang-Undang yang mengatur izin bangunan dan mengakui bangunan sebagai fungsional yang sesuai. Definisi lainnya, SLF adalah bukti atau tanda izin bagi suatu bangunan gedung untuk dioperasikan sesuai dengan dasar hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia (Prajnaparamita, 2018).

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2002, SLF adalah sertifikat yang nantinya akan diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelayakan fungsi bangunan gedung secara teknis dan administratif. Izin ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah, kecuali untuk bangunan yang digunakan oleh pemerintah pusat. SLF sendiri merupakan instrumen kontrol dan evaluasi apakah suatu bangunan memenuhi persyaratan sehingga dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman. (Hardiningsih, 2009)

Tujuan dari Sertifikat Laik Fungsi (SLF) ini adalah:

1. Membuat bangunan atau bangunan yang layak untuk memenuhi persyaratan administrasi bangunan gedung sesuai fungsinya
2. Sebelum dimanfaatkan atau digunakan oleh manusia, harus dikeluarkan izin kelayakan
3. Pemerintah menetapkan kebijakan sesuai dengan kewenangannya dalam mengawasi pengelolaan izin bangunan gedung atau perusahaan.
4. Mewujudkan kepastian hukum dalam suatu perusahaan atau bangunan sesuai dengan peraturan yang ada

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di kota Medan, SLF memiliki dasar hukum, antara lain sebagai berikut:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Lokasi Pertanahan dan Tata Cara Usaha Kawasan Industri serta tata cara pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Usaha Mengganggu (UUG)/HO bagi Perusahaan yang berada di dalam Kawasan Industri;
- 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Gedung Negara; (Heriyusman, 2014)
- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 25/PRT/M/2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang Pedoman Sertifikat Kelayakan Fungsional Bangunan Gedung;
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7) Peraturan Walikota Medan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sertifikat Fungsi Bangunan Gedung.

Fenomena penerbitan SLF di Indonesia dinilai mengalami kemajuan sesuai implementasinya. Kinerja dan penilaian publikasi cukup baik karena dapat dilihat bahwa banyak gedung dan perusahaan telah dibangun dengan baik dan operasinya telah berjalan dengan baik dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam publikasinya, terdapat beberapa faktor kendala yang menjadi tantangan dalam memperoleh SLF, sehingga sulit untuk menilai kinerja bagi sebuah perusahaan. Kendala yang dihadapi dalam menerbitkan SLF untuk perusahaan adalah:

- 1) Terdapat perbedaan pengukuran antara DPMPTSP dan BPN
- 2) Ada hambatan dalam memenuhi kewajiban
- 3) Ada konflik dengan peraturan
- 4) Kekurangan Personil (SDM)
- 5) Ada dana terbatas
- 6) Kurangnya komunikasi mengakibatkan dalam perspektif bahwa mengelola SLF sangat sulit atau bertele-tele. (Wendy Haryanto, n.d.)

Syarat penerbitan SLF (Surat Laik Fungsi) di DPD REI SUMATERA UTARA dilaksanakan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. DPD REI SUMATERA UTARA juga mendukung pelaksanaan program pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dalam pemberian izin kesesuaian bangunan.

Dampak penerbitan SLF di DPD REI SUMATERA UTARA berpengaruh terhadap penilaian dan kinerja perusahaan. Selain itu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tempat itu. Kemudian, penilaian ini akan meningkatkan citra perusahaan sehingga dapat meyakinkan masyarakat dalam memproses izin bangunan dan bangunan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengkaji fenomena SLF (Sertifikat Laik Fungsi) di perusahaan DPD REI SUMATERA UTARA. Selain itu, penulis berfokus pada dampak nilai dan kinerja yang dihasilkan dari publikasi SLF di lokus penelitian (Sugiarta et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menjelaskan fenomena atau peristiwa yang dikaji secara lebih rinci dan berfokus pada pembahasan (Mahanum, 2021). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Pendekatan studi pustaka dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan atau metode mengkaji peristiwa melalui literatur yang telah dipublikasikan oleh peneliti sebelumnya .

Teknik pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan mencari literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian dari buku, tesis, laporan penelitian, jurnal dan esai penelitian (Supriyadi, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti mengutip jurnal sebelumnya dari Scopus, Google Scholar, dan lain-lain. Peneliti mengumpulkan informasi dengan membaca banyak literatur sehingga mereka memiliki informasi yang jelas dan terperinci. Dalam studi ini, peneliti mengeksplorasi informasi. Peneliti melakukan penelitian di perusahaan DPD REI, SUMATERA Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis peroleh berdasarkan beberapa studi pustaka, maka hasil penelitian yang akan dianalisis adalah: (2019, n.d.)

1. Cara menerbitkan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) di Kota Medan
2. Dampak penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) terhadap nilai DPD REI SUMATERA UTARA Perusahaan
3. Dampak penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) terhadap kinerja di Perusahaan DPD REI SUMATERA UTARA
4. Review Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

Cara menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi(SLF) di Kota Medan

Penerbitan SLF di Kota Medan telah diatur dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 31 Tahun 2019 dimana disebutkan ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sebelum menerima surat penerbitan Kondisinya.

1. Status hak atas tanah dibuktikan dengan surat bukti status hak atas tanah. Namun, jika seseorang bukan pemegang hak, hal ini dapat dibuktikan dengan surat perjanjian pemanfaatan tanah
2. Status kepemilikan bangunan gedung yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan bangunan gedung
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Selain itu, ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi dan diperhitungkan bagi setiap perusahaan untuk membangun sebuah gedung, antara lain:

- a. Persyaratan perencanaan bangunan gedung, yang meliputi:
 - Persyaratan penunjukan bangunan
 - Persyaratan intensitas bangunan termasuk kepadatan, tinggi dan jarak bebas
 - 3.Persyaratan arsitektur untuk bangunan termasuk tata ruang, keseimbangan dan bahkan harmoni (Sugiarta et al., 2021).
 - 4.Persyaratan pengendalian dampak lingkungan, dengan mempelajari dan memperhatikan risiko lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan perusahaan atau bangunan yang tidak dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar atau alam
- b. Persyaratan keandalan bangunan gedung yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan meliputi:
 - Persyaratan keselamatan dengan memperhatikan proteksi kebakaran pada bangunan, kondisi keselamatan listrik, bahkan bahan peledak yang dapat membahayakan perusahaan

- Persyaratan kesehatan, dimana setiap bangunan atau perusahaan yang dibangun harus memenuhi air bersih, penerangan, pembuangan limbah, dan penggunaan bahan bangunan
- Persyaratan keamanan termasuk ruang untuk bergerak, kenyamanan pandangan dan bahkan masalah kebisingan
- Persyaratan kenyamanan, dimana transportasi, infrastruktur, bahkan kebutuhan dalam bangunan dan perusahaan mudah didapatkan.

Objek dalam peraturan tersebut adalah bangunan yang dibangun dengan memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung, serta bagian dari bangunan gedung yang terpisah atau dibangun secara horizontal. Subjek adalah individu atau entitas yang memiliki atau memiliki wewenang atas bangunan.

SLF diberikan untuk bangunan yang telah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan kebugaran fungsional bangunan, sesuai dengan Pasal 3. Setelah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, SLF diberikan sesuai Pasal 4 ayat (1). Persyaratan pengelolaan pemeriksaan data sesuai dengan IMB, data tanah, dan data riil lainnya Persyaratan teknis, yaitu sebagai gambar bangunan, uji lapangan pengujian sesuai dengan prosedur pemeriksaan SLF. (Prajnaparamita, 2018)

Termasuk dalam ruang lingkup dan metode pemeriksaan kebugaran, Pasal 5 mencakup a) kemampuan menahan beban. Metode inspeksi meliputi pengamatan visual, pemeriksaan kualitas dengan cordrill, inspeksi palu-palu beton, dan analisis model untuk menghitung beban, gaya, dan daya dukung struktur. b) kebutuhan akan kemampuan untuk mencegah dan mengurangi bahaya kebakaran; dan c) kebutuhan akan kemampuan untuk mencegah hujan petir. (Anwar, tt)

Dampak Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) terhadap Nilai Perusahaan DPD REI SUMATERA UTARA

Perusahaan DPD REI SUMATERA UTARA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi untuk menangani permasalahan perumahan dan bangunan bahkan aktif menyediakan pasokan untuk usaha bangunan. Ini adalah manifestasi dari program pemerintah yang berkelanjutan.

Hal ini tentu saja berdampak pada kredibilitas. Indikator perusahaan yang baik dapat dilihat dari kondisi pasar atau strategi pemasaran suatu perusahaan untuk meningkatkan daya jualnya kepada investor dan masyarakat. Perusahaan DPD REI SUMATERA UTARA saat ini sedang meningkatkan nilai-nilai perusahaan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perannya dalam pembangunan melalui penerbitan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Pada dasarnya, SLF memiliki dampak positif terhadap nilai perusahaan. (Adlini et al., 2022)

Setiap perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi tentu akan merasa lebih aman dan terlindungi dari perlindungan hukum terhadap bangunan gedung melalui SLF. Penerbitan SLF yang dilakukan melalui prosedur yang benar dapat meningkatkan value sehingga masyarakat dan investor dapat percaya dengan misi keanggotaan DPD REI SUMATERA UTARA.

Dampak positif lainnya adalah terbitnya SLF di lingkungan DPD REI SUMATERA UTARA dapat menciptakan manfaat dimana masyarakat yang percaya dengan nilai perusahaan akan memprioritaskan perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain. Kualitas perusahaan akan meningkat sehingga proses implementasi akan lebih mudah dilalui.

Dampak Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) terhadap Kinerja di Perusahaan DPD REI, SUMATERA UTARA

Menurut pendapat ahli, kinerja adalah hasil kerja yang dinilai dari segi kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab (Anwar, 2000). Hasil ini dapat berupa fisik maupun non fisik (Fadli Sandewa, 2017).

Dampak yang dirasakan dari terbitnya SLF (Sertifikat Laik Fungsi) terhadap kinerja Perusahaan DPD REI SUMATERA UTARA berdampak positif. Dimana kinerja akan meningkat, seiring dengan produktivitas kerja. Hal ini dikarenakan terbitnya SLF mampu memberikan rasa percaya dan kenyamanan kepada pekerja, sehingga menghasilkan kepuasan kerja. Terbitnya SLF mampu menghadirkan kepuasan sehingga perasaan ini dapat membantu perusahaan meningkatkan pemasaran yang ada sehingga investor dan masyarakat tertarik untuk bekerjasama dan mempercayakan pembangunan gedung atau kebutuhan lainnya kepada DPD REI SUMATERA UTARA. (Elora, 2021)

Review Persyaratan Teknis Bangunan

Pertama-tama, tim yang terdiri dari para ahli yang akrab dengan manajemen bangunan untuk memberikan pertimbangan teknis terkait dengan proses penelitian dokumen rencana teknis disertai dengan informasi waktu kerja yang terbatas, serta untuk berkontribusi pada penyelesaian masalah dengan pengoperasian bangunan tertentu yang anggotanya ditentukan secara individual sesuai dengan kompleksitas struktur bangunan tertentu yang ditulis. Pembentukan Tim Spesialis Konstruksi Bangunan Gedung Peraturan Daerah tentang Konstruksi Bangunan Gedung berorientasi pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Pedoman Tim Ahli No.26/PRT/M/2007 Konstruksi. (Rothomi & Rafid, 2023)

Dalam hal daerah belum memiliki peraturan daerah sebagaimana disebutkan sebelumnya, penyelenggaraan organisasi tim ahli konstruksi bangunan gedung mengikuti peraturan Menteri nomor Pada:26/2007 untuk perwujudan penataan bangunan gedung dan

lingkungan, serta keandalan bangunan gedung. Hal-hal-hal sebenarnya sudah hidup, rapi, baik, dan hati-hati metode untuk menerapkan aturan agar tidak mendengar lagi "bangunan umum runtuh dan menyiksa masyarakat". (Adlini et al., 2022)

KESIMPULAN DAN SARAN

SLF (Sertifikat Laik Fungsi) adalah bukti untuk menguji kesesuaian suatu bangunan atau struktur secara administratif dan teknis. Dalam hal ini, DPD REI SUMATERA UTARA yang berperan dalam penyediaan konstruksi bangunan mewajibkan penerbitan SLF untuk meningkatkan kualitas perusahaan yang dijalkannya. Ada dua indikator yang dapat berpengaruh terhadap penerbitan SLF, yaitu value dan performance. Keduanya memberikan dampak positif terhadap penerbitan SLF bagi perusahaan sehingga kualitas dan kuantitas yang tersedia menjadi lebih baik dan lebih meyakinkan bagi masyarakat dan investor.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang menemani dalam masa magang. Terutama ucapan terima kasih kepada perusahaan DPD REI SUMATERA UTARA.

DAFTAR REFERENSI

- 2019, P. W. (PERWALI) K. M. N. 31 T. (n.d.). *Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Anwar, P. (2000). P. K. B. C. (n.d.). *Prestasi Kerja. Bumi Cipta*.
- Elora, D. (2021). Sertifikat Laik Fungsi pada Bangunan Gedung di Kota Bandung Dalam Kaitannya dengan Izin Mendirikan Bangunan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 963. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1687>
- Fadli Sandewa. (2017). Faktor Faktor Yang Mempeng Aruhi Kinerja Pegawai di Kabupaten Banggai Kepulauan. *Jurnal Ilmiah Clean Government*, 1(1), 90–113.
- Fatma Cholida, N. F., Purwanti, H., Sudarmanto, B., & Anggraini, L. (2020). Kesiapan Instansi Pemerintah Kota Semarang Dalam Menghadapi Peraturan Sertifikat Laik Fungsi (Slf) Bangunan Gedung. *Teknika*, 15(2), 76. <https://doi.org/10.26623/teknika.v15i2.2668>
- Hardiningsih, P. (2009). DETERMINAN NILAI PERUSAHAAN (Pancawati Hardiningsih). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 5(2), 231–250. <http://unissula.ac.id/wp->

content/uploads/2012/04/panca.pdf

- Harisun, E. (2013). Kajian Sistem Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung Di Kota Ternate Propinsi Maluku Utara. *Jurnal Ilmiah MEDIA ENGINEERING*, 3(1), 14–22.
- Heriyusman, D. (2014). Pemetaan Faktor-Faktor Pengaruh Implementasi Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung: Pendekatan Gap Analysis. *Jurnal Sains dan Teknologi ISTP*, 15(2). <https://doi.org/10.59637/jsti.v15i2.89>
- lia dwi jayantiMPOC, & Brier, J. (2020). PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN. *Dewan Minyak Sawit Malaysia (MPOC)*, 21(1), 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>
- Prajnaparamita, K. (2018). Aspek Hukum Sertifikat Layak Fungsi (SLF) Bangunan Dalam Rangka Penghindaran Kecelakaan Kerja. *Jurnal Hukum Administrasi dan Tata Kelola*, 1(4), 391–397. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.391-397>
- Rothomi, A., & Rafid, M. (2023). Analisis Hubungan dan Konsep Teori dan Pendidikan Human Capital. *EDUCATUM: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 1(1), 26–31. <https://doi.org/10.59165/educatum.v1i1.14>
- Sugiarta, I. N. G., Dinar, I. G. A. A. G. P., & Putra, I. M. A. M. (2021). Urgensi Sertifikat Laik Fungsi (Slf) Bangunan Terhadap Usaha Jasa Akomodasi Pariwisata di Kota Denpasar. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 116–121. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.116-121>
- Supriyadi, S. (2017). Komunitas Praktisi: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan antar Pustakawan. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, 2(2), 83. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v2i2.13476>
- Wendy Haryanto. (n.d.). *Kendala Pengembang dalam Mengurus SLF*.